

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH IMPLEMENTASI PERAN
BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
(Studi Bappeda Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syariah

Oleh
BUNGA EMI LAITA SARI
NPM. 1721020159

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)



FALKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022M

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH IMPLEMENTASI PERAN
BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
(Studi Bappeda Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syariah

Oleh:

BUNGA EMI LAITA SARI
NPM. 1721020159

Pembimbing I :dr. Iskandar Syukur,M.A

Pembimbing II :Dharmayani, S.H.I.,M.Sy.

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)

**FALKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022M**

ABSTRAK

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang yang berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Peran Bappeda mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum pelaksanaan kerja sama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga baik pemerintah maupun swasta. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu pembangunan nasional. Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang maju dan sejahtera yang tertuang dalam Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang RKPD tentang pemerintah daerah yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman yang disusun dengan pedoman. adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rancangan Kerja Pemerintah Daerah atau di sebut dengan (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan merancang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Yang bertujuan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini terbentuk lah suatu rencana tingkat satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Selama tiga tahun belakangan terhitung sejak tahun 2018,2019,2020 pembangunan infrastruktur daerah di kab. Lampung Utara terhambat oleh beberapa faktor yang belum jelas diketahui. tidak sedikit pedesaan yang ada di Kab.Lampung Utara masih belum memiliki sarana jalan yang baik.

Penelitian ini Mencoba Menganalisis Peran Dinas Bappeda Bagian Perencanaan Kab. Lampung Utara Dalam Penyusun Rencacana Kerja Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan infrastruktur Berdasarkan Tinjauan Fiqih Siyasah Rumusan masalahnya adalah penelitian ini, Bagaimana Peranan Dinas Bappeda Dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah? Dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap implementasi peranan Bappeda dalam penyusuna rencanan kerja pemerintah daerah mewujudkan pembangunan infrastruktur ? Metode Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian ini Deskriptif Analisis yaitu Dengan Cara Menganalisis data Yang Diteliti yang Dilakukan Dilapangan Aatau Respodnen. Teknik Pengumpulan Data Yang digunakan Berupa Buku, Dokumen, Peraturan Undang-Undang , Wawancara.

Kata kunci: Pembangunan, Bappeda, ekonomi



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bunga emi laitasari
NPM : 1721020159
Jurusan/Prodi Studi : SiyasaHSyar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih SiyasaHS Implementasi Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dalam perpustakaan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2021

Penulis



Bunga Emi Laitasari

NPM. 1721020159



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasa Implementasi Peran Bappeda
Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur
(Studi Bappeda Kab. Lampung Utara)**

Nama : Bunga Emilaita Sari

NPM : 1721020159

Jurusan : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

NIP. 196603301992031002

Pembimbing II

Dharmayani, S.H.I., M.Sy.

NIP. 2014080919840101118

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Frenk, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasa Implementasi Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daeran Mewujudkan Pembangunan Infrasartruktu (Studi Bappeda Kab. Lampung Utara)”** disusun oleh : **Bunga emi laita sari , NPM : 1721020159**, program studi : **Siyasah Syar’iyyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin , 4 Oktober 2021.**

TIM PENGUJI


Ketua : Drs. Henry Iwansyah, MA

Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., MH

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M.Sy.



.....

.....

.....

.....

.....

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H,
NPM 17208262003121002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya: Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Q.S Asy-Syarah 6-8)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa, shalawat tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Amin.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terimakasih aku ucapkan untuk:

1. Terimakasih kepada orang tuaku, Bapakku dan Mamakku (Suhemik dan Eliymaryanti), yang telah membesarkanku, dan senantiasa mendoakan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas jasa-jasa dan pengorbanan yang tidakakan pernah bisa terbalaskan, serta dukungan moril maupun materil, dan terimakasih atas segala curahan kasih sayang dan keikhlasan hati yang takhenti-henti kalian berikan, dimana ini semua membuat diriku yakin bahwa Ridho Allah SWT adalah ridho Orang tuaku.
2. Untuk kedua adikku Aditia Dwi Nugraha, dan M. ican Dwi Nugraha yang telah memberikan do'a, semangat dan motivasi selama ini.
3. Untuk kedua dosen pembimbingku Ibu Dharmayani, Dan Bapak Iskandar Syukur, yang telah ikhlas membimbing seluruh rangkain pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Hevina Nopriza, Della, Putri, Febi, Meylinasari dan semua teman-teman siyasa F angkatan 2017 (terima kasih telah menjalin pertemanan dengan ikhlas dan tulus, serta kebaikan-kebaikan kalian selama masa perkuliahan baik didalam maupun diluar kampus, semoga tali silaturahmi kita tetap bisa terjaga walaupun kita sudah sering tak bertatap muka).

5. Untuk seluruh keluarga besar saya yang selalu mensupport saya untuk cepat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
6. Untuk almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung.

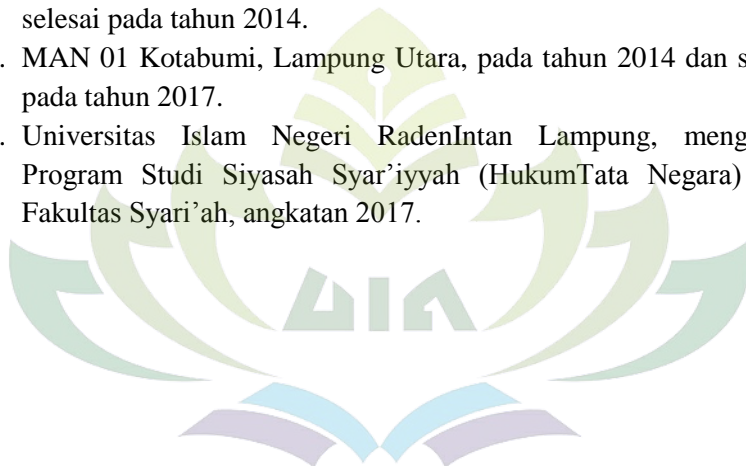


RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Bunga emi laita sari, lahir di Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, pada tanggal 04 Juli 1998, anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Suhemik dan Eliyamaryanti.

Riwayat Pendidikan:

1. Taman Kanak-Kanak Mutaqin Kotabumi, Lampung Utara, pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2006.
2. SDN 03 Tanjung aman Kotabumi, Lampung Utara, pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2014.
3. SMP Negeri 03 Kotabumi ,Lampung Utara, pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014.
4. MAN 01 Kotabumi, Lampung Utara, pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017.
5. Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung, mengambil Program Studi Siyasah Syar'iyah (HukumTata Negara) pada Fakultas Syari'ah, angkatan 2017.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya juga nikmat ilmu pengetahuan, sehat dan iman. Sehingga skripsi dengan judul “Tinjaun fiqih siyasah implementasi peran Bappeda dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah mewujudkan pembangunan infrastruktur (Studi Bappeda Kabupaten Lampung Utara) dapat terselesaikan. Shalawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat Syafa'at dari Beliau di Yaumul Mahsyar kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syari'ah. Dalam penyusunan skripsi ini tentu penulisan dan penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tak lupa penulis mengahaturkan beribu-ribu terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Siyasah Bapak Frengki, M.Si
4. Dosen pembimbing akademik Bpk Dr Iskandar Syuku, M.A dan Ibu Dharmayani, S, H. I., M. Syyang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen, para staf di Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmu guna bekal dihari nanti.

6. Kedua orang tuaku, Bapak Suhemik dan Ibu Eliyamaryanti yang selalu berdoa dan berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semuanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu ke Islaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 23 Agustus 2021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikasi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistemmatika penulisan.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Fiqih Siyasah.....	15
B. Ruang lingkup Fiqih Siyasah.....	17
C. Kedudukan Fiqih Siyasah Dalam Sistem Hukum Islam.....	19
D. Penyusunan Rencana Kerja Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dalam Fiqih siyasah.....	22
E. Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur.....	24
F. Fungsi Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja.....	32

G. Tugas Dan Fungsi Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur	35
H. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	45
2. Karakter Topografik	45
3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk Lampung Utara	47
B. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Lampung Utara	49
1. Tugas Dan Fungsi Bappeda Lampung Utara.....	49
2. Strukur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50
3. Visi Misi Bappeda	54
C. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur	56
D. Faktor Penghambat Dan Penndukung Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur.....	59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran BAPPEDA Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lampung Utara	69
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrstruktur Kabupaten Lampung Utara	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulisan akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Fiqih Siyasah Implementasi Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastrukturu (Studi Bappeda Kabupaten Lampung Utara)”**. adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil peninjau padangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya¹.
2. *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri²
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM memuat rancangan kerangka ekonomi daerah , prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya.³

¹ Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua(Jakarta:Balai Pustaka, 1991),h 105

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta : 1 Prenadamedia Group, 2014), h 4.

³Online Tersedia di: <https://www.pengadaanbarang.co.id>

4. Pembangunan adalah proses cara perbuatan membangun, suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir agar dapat menjadi proses yang dapat bergerak maju. Yang menurut mohammad ali merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia.⁴.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulisan untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara objektif

Pembangunan saat ini sangat penting dengan adanya pembangunan yang maju dan baik maka daerah tersebut akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor yang sangat penting di dalam suatu negara. Serta dalam perencanaan pembangunan perlunya dibentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memiliki tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Konsistensi program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar penyusunan dan pembahasan yang disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Namun ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya seperti hambatan eksternal, waktu dan

⁴Tim Redaksi, *Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan*, (Yogyakarta: Laksana, 2017, 97

sumber daya, kebijakan yang tidak di dasarkan pada landasan pemikiran (teoritis) yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai, lembaga pelaksana jarang yang mandiri, jarang ada kesepakatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya, jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dilihat dari permasalahan ini lah menjadi alasan untuk penulis meneliti tentang permasalahan ini.

2. Secara subjektif

- a. Pembahasan ini memiliki relevan dengan disiplin ilmu yang di tekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan Tijakan Fiqih Siyasah Implementas Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur (Studi Bappeda Kabupaten Lampung Utara)

C. Latar Belakang Masalah

Implemtasi adalah tindakan –tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujaun untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implentasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapai tujuan dari program yang telah direncanakan, karena dasarnya, setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Peran Bappeda melaksanakan tugas analisi dan perumusan

kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistic, tematik dan integrative, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu pembangunan nasional. Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang maju dan sejahtera yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, serta rancangan kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (tahun) yang disusun dengan pedoman pada rencana kerja pemerintah daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dengan pembangunan infrastruktur daerah seperti pedesaan tentunya dapat mendorong negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang lebih maju. Rancangan Kerja Pemerintah Daerah atau di sebut dengan (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan merancang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.⁵ Yang dimana di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini terbentuk lah suatu rencana tingkat satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melalui forum Musyawarah

⁵Online tersedia di: <http://infopublik.id/read/152420/rkpd-mempunyai-fungsi-strategis-dalam-penyelenggaraan-pemda.html>

Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Selama tiga tahun belakangan terhitung sejak tahun 2018,2019,2020 pembangunan infrastruktur daerah di kab. Lampung Utara terhambat oleh beberapa faktor yang belum jelas diketahui. Tidak sedikit pedesaan yang ada di kab. Lampung Utara masih belum memiliki sarana jalan yang baik, seperti masih banyak nya jalan pedesaan yang belum teraspal masih dengan kondisi jalan tanah merah sehingga pada saat diguyur hujan akan menjadi licin dan membahayakan warga desa yang melintas.

Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap daerah-daerah terpencil di Indonesia salah satunya daerah-daerah pedesaan yang ada di Lampung Utara membuat masyarakat belum bisa hidup dengan layak dan sejahtera. Padahal pengembangan pembangunan di suatu daerah sangatlah penting untuk mendorong sumber daya manusia yang sejahtera.. Dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti salah satunya jalan lintas pedesaan yang baik, membuat perjalanan lintas antar desa dan kota jadi lebih mudah dijangkau pemutar sumber daya ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan semestinya, serta dengan pembangunan infrastruktur daerah yang dapat berkembang dengan baik dapat membuat negara Indonesia menjadi negara yang Maju dengan masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Negara dan sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimana dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa.⁶

⁶Online tersedia di: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>

Pentingnya peran pemerintah di suatu Negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagi macam hal yang diamana salah satunya, Negara memiliki peran penting dalam proses menuju rakyat Indonesia yang sejahtera. Yang tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 pada alinea keempat “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam islam pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala kentuannya. adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah dimuka bumi). Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan diatas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah mendirikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (al-taqwa) dan potensi keburukan (al-fujur). (QS, 91:8-10).⁷

Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat di daerah-daerah pedesaan pada kabupaten Lampung Utara yang belum hidup dengan sejahtera dikarenakan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana desa yang belum sepenuhnya memadai, seperti jalan pedesaan yang masih belum di aspal, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai objek

⁷Online tersedia di: <https://aceh.tribunnews.com/2016/11/04/pembangunan-dalam-perspektif-islam>

penelitian dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Implementasi Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastrukturu (Studi Bappeda Kabupaten Lampung Utara)”**

D. Fokus penelitian

Bedasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam Tinjauan Fiqih Siyasah Implementasi Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastrukturu (Studi Bappeda Kabupaten Lampung Utara)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulisan menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Bappeda Dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi peran Bappeda dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah mewujudkan pembangunan infrastruktur?

F. Tujuan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penyusunan Rencana kerja pemerintah daerah pada Kabupaten Lampung Utara

- b. Untuk mengetahui bagaimana Tujuan Fiqih Siyasah Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur tersebut

2. Kegunaan Penelitian

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini sebagai upayah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Siyasah Syar'iyah khususnya tentang ketatanegaran.
- b. Secara Praktis Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dengan ilmu Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Signifikasih secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik yang terlibat dalam sistem pengelolaan, serta mampu memberikan pemahaman sesuai hukum islam.
2. Signifikasih secara praktik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atas peraturan yang berlaku didalam hukum islam yang berkenaan dengan

kemaslahatan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti, khususnya fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).⁸ Alasan penelitian ini mengkaji kegiatan ketatanegaraan, dimana melakukan penelitian untuk mengetahui rancangan kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur pada Kabupaten Lampung Utara sesuai atau tidak dengan ketentuan prinsip tinjauan fiqih siyasah, sehingga melahirkan analisis dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada sistem pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan tinjauan fiqih siyasah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah actual yang kini tengah berekecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala maupun proses sosial⁹. dalam hal ini akan mengamati penyusunan rencana kerja pemerintah daerah mewujudkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2012). h.8.

⁹Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986). h.5.

Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan dan melukiskan secara sistem fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat¹⁰. Penelitian yang menulis gagasan ditunjuk untuk melukiskan melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang teliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan tinjauan fiqh siyasah yang terfokus pada sistem penyusunan rencana pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur Kabupaten Lampung Utara.

3. Sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber dari primer dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan aparatur pemerintahan di dinas bidang Bappeda bagian perencanaan Kab. Lampung Utara

b. Data Sekunder

Bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam

¹⁰Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*. (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). h.23

hal ini diperoleh dari hasil bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti seperti Al-Qur'an dan Hadist, buku-buku, dokumen, dan artikel yang ada yang berhubungan dengan penelitian ini. Kabit perncanan dan kasibagian perencanaan Kabupaten Lampung Utara.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karna tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan beberapa metode antara lain. Data primer dapat diperoleh dengan beberapa metode yaitu:

1. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian. Dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab biasa sambil bertatap muka dengan orang-orang yang di bidang perencanaan yang saya wawancara kabit perencanaan dan kasi bagian perencanaan dan beberapa masyarakat yang saya wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk melengkapi data-data penulis, baik data primer maupun data sekunder sebagai sumber data yang di dapat di dimanfaatkan untuk menguji dan manafsirkan.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Op,Cit*, h.115

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses dan menyusun secara sistematis yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang memperoleh dilakukan dengan cara analisi kualitatif yaitu digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut diketahui serta di peroleh kesimpulan indukatif, yaitu cara berfikir dalam mengambil

kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan dan dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab kedua berisi kajian teori tentang fiqih siyasah meliputi pengertian fiqih siyasah, kedudukan fiqih siyasah dalam hukum islam, pandangan fiqih siyasah terhadap peran Bappeda dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah mewujudkan pembangunan infrastruktur, dasar hukum Pemerintahan Daerah, dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bab ketiga berisi laporan hasil penelitian tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, gambaran singkat Dinas Bappeda Lampung Utara, tugas dan fungsi Dinas Bappeda Lampung Utara, visi dan misi, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah mewujudkan pembangunan infrastruktur Kabupaten Lampung Utara dan dilanjutkan tentang praktik peran Dinas Bappeda dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah mewujudkan Pembangunan Infrastruktur.

Bab keempat analisis data yang berisi tentang peranan Dinas Bappeda dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lampung Utara dan Tinjauan Fiqih Siyasa Implementasi Peran Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Utara adalah melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan yang terakhir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebagai penetapan.

Dengan demikian Tinjauan *Fiqh Siyasah* dalam Mewujudkan Pelaksanaan fungsi perencanaan dengan teori pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara sehingga berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqh siyasah* namun tetap mengedepankan nilai-nilai Islam karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aturan pemerintah daerah BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara telah menjalankan sehingga berdasarkan perannya sesuai dengan Keputusan peran dan fungsinya Presiden No. 27 Tahun 1980. tersebut dilihat dari peran BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara dalam BAPPEDA juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahap ke dua (2017- 2022). Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari

pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas demi mencapai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara yang lebih baik, penulis ingin memberikan rekomendasi yang mungkin berguna dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai diantaranya sebagai berikut :

Diharapkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi publik, agar masyarakat lebih mempercayai semua keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah tanpa hanya sekedar menjalankan kegiatan administratif dan seremonial dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, demi tercapainya pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran.

Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kabupaten Lampung Utara supaya meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instansi vertikal di daerah melalui *planning*, *monitoring* dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005),
- Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Solo: Pondok Edukasi, 2002),
- Bintaro Tjokroamidojo, *Perencanaan Pembangunan, Cet Ke-9*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996),
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua(Jakarta:Balai Pustaka, 1991),
- Djazuli, *Fiqh Siyash* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007),.
- Febrianingsih, Nunuk. “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik”. *Jurnal RechtsVinding*. Vol.1, No.1,(2012),
- Handoko T. Hani, *Manajemen, Edisi II*, (Yogyakarta: BAFE, 2003),
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyash; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),
- Indra Bastian, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), Joni Bedyal, “Pembangunan dan Infrastruktur”, *Wawancara*, 27 Juni 2021
- Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*,(Jakarta: Gramedia, 1986).

Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet ke-1*, (Jakarta: Prenada Media, 2014),

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta : 1 Prenadamedia Group, 2014),

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah Cet Ke-1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),

Pasal 1, Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 20, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 3.

Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah,...

Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018),

Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta 2012)..

Suharsimi Arikunto, *Op,Cit*,

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*. (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Syafiie Inu Kencana, *Menejemen Pemerintahan*, (Jakarta: PT PERCA, 2007),

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),

Tim Redaksi, *Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan*, (Yogyakarta: Laksana, 2017,

Uno Hamzah B, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),

Sumber Online:

Online tersedia di: <http://infopublik.id/read/152420/rkpd-mempunyai-fungsi-strategis-dalam-penyelenggaraan-pemda.html>

Online Tersedia di: <https://www.pengadaanbarang.co.id>

Online tersedia di: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>

Online tersedia di:

<https://aceh.tribunnews.com/2016/11/04/pembangunan-dalam-perspektif-islam>

Wawancara:

Andi Wijaya, “Peranan Bappeda dalam Pembangunan Daerah”, *Wawancara*, 28 Juni 2021.

Fellix Sulandana, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan”, *Wawancara*, 25 Juni 2021

Joni Bedyal, “Pembangunan dan Infrastruktur”, *Wawancara*, 27 Juni 2021

M. Islam Arief, “Komitmen Pemerintah”, *Wawancara*, 28 Juni 2021

Sari Husin, “Kesiapan Anggaran Dalam Pembangunan”, *Wawancara*, 25 Juni 2021

